



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**UNIT KERJA** : RSJ MENUR SURABAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : VITRIA DEWI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 735750

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.181.327.771**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.670.400.000
2. Tanah Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 121.600.000
3. Tanah Seluas 242 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/92 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 57.07 m2/57.07 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 469.327.771

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 456.100.000**

1. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4GM/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 92.500.000
4. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E MT CKD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 122.500.000
5. MOTOR, HONDA H1B02N42L0A/T / SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.200.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 37.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.028.467.125
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.703.394.896
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.703.394.896

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.